BAB I

PENDAHULUAN

1 . 1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan kebutuhan atas perumahan yang layak seiring dengan pertumbuhan penduduk yang pesat dan kepadatan penduduk yang makin meningkat menyebabkan pemerintah Indonesia memandang perlu melakukan langkah solusi yang radikal dalam rangka menanggapi perkembangan kebutuhan tersebut. Rumah susun hadir sebagai solusi radikal berupa alternatif hunian guna menanggulangi kepadatan penduduk yang makin tinggi di kota-kota besar dan demi memenuhi kebutuhan papan masyarakat perkotaan yang semakin sulit seiring makin sempitnya lahan. Langkah yang diambil pemerintah sebagai solusi untuk mengimbangi perkembangan tersebut adalah membenahi berbagai pengaturan di dunia perumahan, salah satunya dengan melahirkan Undang undang No.20 tahun 2011 tentang Rumah Susun (**Undang – undang Rumah Susun)**. Pengaturan mengenai rumah susun memang diperlukan mengingat peningkatan pembangunan perumahan diperkotaan yang padat perlu didukung oleh suatu Undang-undang yang dapat menjamin iklim property yang kondusif. Selain itu undang-undang memegang peran ynang sangat penting karena ketentuan dalam undang-undang akan menentukan peningkatan mutu dan kualitas rumah susun yang dikembangkan tersebut mengakomodir tantangan kebutuhan papan masyarakat Indonesia.

Penghuni rumah susun wajib membentuk perhimpunan penghuni yang berkewajiban untuk mengurus kepentingan bersama para pemilik dan penghuni yang bersangkutan dengan pemilikan dan penghuniaannya, jadi penghuni satuan rumah susun tidak dapat menghindarkan diri atau melepaskan kebutuhannya untuk menggunakan bagian bersama, benda bersama, tanah bersama, maka dibentuk perhimpunan penghuni yang mengatur dan mengurus kepentingan bersama. Perhimpunan Penghuni Rumah Susun merupakan salah satu bentuk organisai nirlaba. Meskipun begitu, para pengurus organisasi nirlaba memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerja dan penggunaan dana yang telah terhimpun. Sebagaimana halnya organisasi pada umumnya, organisasi nirlaba juga membutuhkan pelaporan akuntansi. Baik untuk menghasilkan informasi keuangan maupun untuk meningkatkan mutu pengawasan organisasi yang bersangkutan. Di Indonesia, standar pelaporan organisasi nirlaba diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 (revisi 2011) tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.

Standar akuntansi keuangan memuat konsep standar dan metode yang dinyatakan sebagai pedoman umum dalam praktik akuntansi perusahaan dalam lingkungan tertentu. Akuntansi Keuangan di Indonesia disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yaitu Ikatan Akuntansi Indonesia(IAI). Indonesia juga telah memiliki kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang merupakan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para pemakai eksternal. Jika terdapat pertentangan antara kerangka dasar dan Standar Akuntansi Keuangan maka ketentuan Standar Akuntansi

Keuangan yang harus diunggulkan relatif terhadap kerangka dasar ini. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 (revisi 2011) merupakan standar khusus untuk organisasi nirlaba. Karakteristik organisasi nirlaba sangat berbeda dengan organisasi bisnis yang berorientasi untuk memperoleh laba. Perbedaan terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasionalnya. Organisasi memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi yang bersangkutan.

Akuntansi organisasi nirlaba masuk ke dalam kategori akuntansi sektor publik. Secara kelembagaan domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat dan daerah serta unit kerja pemerintah) perusahaan milik negara (BUMN dan BUMD) Perhimpunan – perhimpunan, organisasi politik dan organisasi massa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), universitas dan organisasi nirlaba lainnya (Mardiasmo 2002:2). Tujuan utama laporan keuangan organisasi nirlaba berdasarkan PSAK No. 45 (revisi 2011) adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba. Berdasarkan uraian diatas, maka judul penelitian yang di lakukan adalah " **Analisis penerapan PSAK No. 45 (revisi 2011) dalam kaitannya terhadap pelaporan keuangan entitas nirlaba pada Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian (PPRSH) Kondominium Kintamani "**

1 . 2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah kesesuaian penerapan PSAK no. 45 yang dikaitkan dengan laporan keuangan, dan di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan PSAK No. 45 (revisi 2011) dalam kaitannya terhadap pelaporan keuangan entitas nirlaba pada Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian (PPRSH) Kondominium Kintamani ?
2. Apakah penerapan PSAK No. 45 (revisi 2011) dalam kaitannya terhadap pelaporan keuangan entitas nirlaba pada Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian (PPRSH) Kondominium Kintamani, telah dilaksanakan dengan konsisten ?

1 . 3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah :

a) Untuk Mengetahui bagaimana penerapan PSAK No. 45 (revisi 2011) dalam kaitannya terhadap pelaporan keuangan entitas nirlaba pada Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian (PPRSH) Kondominium Kintamani, telah dilaksanakan dengan konsisten.

b) Untuk mengetahui apakah penerapan PSAK No. 45 (revisi 2011) dalam kaitannya terhadap pelaporan keuangan entitas nirlaba pada Perhimpunan

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
YAYASAN ABDI KARYA

Penghuni Rumah Susun Hunian (PPRSH) Kondominium Kintamani, telah dilaksanakan dengan konsisten.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

a) Bagi Peneliti

Untuk mengembangkan wawasan penulis dalam mempelajari Analisis Penerapan PSAK No. 45 (Revisi 2011) Dalam kaitannya Terhadap Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba Pada Perhimunan Penghuni Rumah Susun Hunian (PPRSH) Kondominium Kintamani

b) Bagi Perusahaan

Sebagai kontribusi bagi perusahaan, serta suatu sumbangan ide dan masukan guna mengevaluasi perlakuan akuntansi yang selama ini telah diterapkan perusahaan.

c) Bagi Pihak Pembaca

Dapat dijadikan bahan bacaan atau referensi bagi mahasiswa Universitas Satya Negara Indonesia Jakarta, khususnya fakultas Ekonomi sebagai kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi, khususnya bagi praktisi ekonomi dan akademis.

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
YAYASAN ABDI KARYA